

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi dari Bappeda mengenai Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara ini.

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I dan II), yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan ini;
- KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Palembang, 24 September 2025

Perangkat Daerah :
Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan


Hj. Puspawaty, ST., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197505251997032003

Pimpinan Rapat
An. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Kaubbid SDA dan IPTEK,


Muhammad Suro, SP., M.Eng.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680616 199803 1 005

Keterangan :

Lampiran I : Absensi

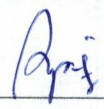
Lampiran II : Notulen/Checklist Verifikasi Rankhir Renstra PD

Lampiran I**DAFTAR HADIR PESERTA PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029 (PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Provinsi : Sumatera Selatan

Tanggal : 24 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Bidang PPP Lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. Puspawaty, ST., M.Si	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
2	Dr. Ika Oktavianti, SE., M.Kom	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
3	Nuryanto, DCN, M.Kes	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	
4	Dr. Ir. Nila Mayang Sari, MBA	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala UPTB Science Techno Park	
5	Irni Novitha, S.Kep., MPH	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencana Ahli Muda	
6	Fitry Rahmawaty, ST	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Plh. Kasubbag Program dan Kerjasama	
7	Rio Rinaldo, SE	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencana Ahli Pertama	

Lampiran Berita Acara
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
Tahun 2025-2029
Perangkat Daerah :
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KETENTUAN UMUM				
1.	Renstra Perangkat Daerah mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025		√	Tidak sinkron antara daftar isi dan judul pada Bab III (untuk disesuaikan); Sistematika penulisan untuk mempedomani SE SEKDA (Jenis huruf Bookman Old Style Font 12 spasi 1,5 kertas F4)
KETENTUAN BAB PER BAB				
BAB I PENDAHULUAN				
2.	Pada Dasar Hukum telah memuat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah		√	Untuk ditambahkan Perpres No.12 Tahun 2025 tentang RPJMN; Permendagri No 67 Tahun 2011; Perda Riset; Kepmendagri (untuk ditambahkan semua peraturan yang relevan dengan penulisan dokumen restra BRIDA)
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				
3.	Penyajian Data dan Informasi memuat Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 Tahun (Tabel 2.1 SE SEKDA)	√		Masih terdapat tabel yang kosong, agar dilengkapi
4.	Penyajian Anggaran dan Realisasi Pendanaan selama 5 Tahun (Tabel 2.2 SE SEKDA) dibagi berdasarkan Komponen Pendapatan (Jika ada) dan Komponen Belanja PD	√		Tabel masih kosong, agar dilengkapi
5.	Perumusan Permasalahan PD dirumuskan dari Hasil Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 tahun terakhir		√	Perumusan masalah belum disusun berdasarkan analisis data yang ada pada sub bab sebelumnya
6.	Isu Strategis PD mengacu pada Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (Tabel 2.3 SE SEKDA)	√		Tabel masih kosong, agar dilengkapi
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
7.	Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) dan dirumuskan dari NSPK dan/atau Sasaran RPJMD yang relevan	√		Sesuai Inmen No. 2 Hal.85
8.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD beserta indikator dan target telah disajikan sesuai Tabel 3.1 SE SEKDA		√	Tabel belum sesuai dengan SE Sekda, kurang kolom NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan;

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kurang kolom Baseline 2024 (agar ditambahkan).
9.	Strategi PD memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah		√	Belum mempedomani Inmen 2 dan SE SEKDA
10.	Penahapan Renstra PD telah disajikan sesuai Tabel 3.2 SE SEKDA		√	Belum ada tabel Penahapan renstra PD, (untuk ditambahkan)
11.	Arah Kebijakan Renstra PD mengacu pada Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Tabel 3.3 SE SEKDA) dan Sinkron dengan Arah Kebijakan pada RPJMD		√	Belum ada tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (untuk ditambahkan)
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
12.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD mengacu pada Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Tabel 4.1 SE SEKDA)		√	Tabel Belum sesuai, agar disesuaikan dengan SE SEKDA
13.	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra PD mengacu pada Tabel 4.2 SE SEKDA		√	Tabel Belum sesuai, agar disesuaikan dengan SE SEKDA
14.	Pagu Program OPD beserta indikator dan target telah sinkron dengan RPJMD	√		Tabel Belum sesuai, agar disesuaikan dengan SE SEKDA
15.	Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan 12 Program Strategis HDCU (jika ada)		√	Belum ada tagging kegiatan, agar ditambahkan sesuai dengan SE SEKDA
16.	Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan Proyek / Kegiatan Program Strategis Nasional (ProSN) (jika ada)		√	Belum ada tagging kegiatan, agar ditambahkan sesuai dengan SE SEKDA
17.	Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan pada Tabel 4.3 SE SEKDA	√		
18.	PD telah merinci Komponen Belanja Tahun 2025-2030		√	Agar memuat komponen belanja Tahun 2025-2030
19.	Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan Tabel 4.4 SE SEKDA, yang seluruhnya mengacu pada Indikator Tabel 4.3 RPJMD beserta targetnya. Indikator Tabel 4.3 RPJMD dimaksud meliputi IKD Aspek yang relevan dengan Tusi OPD dan seluruh IKK per Urusan		√	Kurang kolom Baseline 2024, agar ditambahkan. (d disesuaikan dengan RPJMD)
20.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan bersumber dari Indikator Outcome serta Indikator lain yang relevan dengan Urusan Perangkat Daerah (Tabel 4.5 SE SEKDA)	√		Untuk dicermati lagi
BAB V PENUTUP				
21.	Perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam		√	Untuk ditambahkan dan dilengkapi sesuai SE SEKDA

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pembangunan daerah meliputi : 1) Gender dan inklusi sosial; 2) Pembangunan berkelanjutan; 3) Transformasi digital; 4) Pembangunan rendah karbon; dan 5) Pembangunan berketahanan iklim.			
KETENTUAN LAINNYA				
22.	Renstra PD telah memuat sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0008)		√	Belum ada, untuk ditambahkan dan dianggarkan
23.	Renstra PD telah memuat sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0010)		√	Belum ada, untuk ditambahkan dan dianggarkan
24.	Renstra PD telah menganggarkan Penyusunan Perubahan Renstra PD pada tahun 2027 melalui sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)		√	Belum ada, untuk ditambahkan dan dianggarkan
25.	Renstra PD telah menganggarkan seluruh sub Kegiatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)			OPD tertentu, Balitbangda tidak termasuk
26.	Renstra PD diinput di dalam SIPD : 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Program/Kegiatan/Subkegiatan 4. Indikator Kinerja Utama PD 5. Indikator Kinerja Daerah / Indikator Kinerja Kunci PD		√	Agar dilengkapi untuk diinput Indikator kinerja utama PD dan Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci PD pada aplikasi SIPD
27.	DSSD Tahun 2020 – 2025 telah diinput dalam E-Walidata SIPD		√	Agar diisi tahun 2020 dan 2025



NOTULEN

Acara	:	<i>Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)</i>
Hari/Tanggal	:	Rabu / 24 September 2025
Waktu	:	08.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Bidang PPP Bappeda Sumsel
Susunan Acara	:	1. Pembukaan 2. Pembahasan 3. Penutup
Pimpinan Rapat	:	Kasubbid SDA dan IPTEK
Koordinator	:	PIC Bidang PEPS
Pencatat	:	Ika Widiastuty, SP., M.Si

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan :

Kasubbid SDA dan IPTEK

Muhammad Suro, SP., M.Eng.

- Sehubungan dengan telah ditetapkannya RPJMD Sumsel Tahun 2025-2029 melalui Perda No. 2 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025, dan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa penetapan perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat satu bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan atau pada tanggal 29 September 2025;
- Bappeda telah bersurat ke OPD melalui Surat Edaran Sekda Nomor:000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tanggal 10 September 2025 Tahun 2025-2029. tentang Pedoman penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
- Selanjutnya, Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan SE Sekda di atas kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
- Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
- Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah;
- Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Pembahasan Rancangan Akhir Renstra PD dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2025.

2. Pembahasan :

Kasubbid SDA dan IPTEK

Muhammad Suro, SP., M.Eng.

Rambu-rambu pembahasan Renstra :

- Pembahas memastikan agar draft Renstra PD mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025 (Bab dan Sub Bab);
- Pembahas memastikan agar Tujuan pada Renstra PD dirumuskan dari NSPK atau pada Pohon Kinerja Level 2, 3, dan 4 dan berjumlah maksimal 1 Tujuan (Termasuk OPD yang mengampu lebih dari 1 Urusan);
- Pembahas memastikan agar Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan kalimat yang menjawab Tujuan Perangkat Daerah (hubungan sebab akibat);
- Indikator Sasaran pada RPJMD harus dikawal menjadi indicator Tujuan Renstra sehingga menjadi IKU Kepala OPD pada Renstra OPD;
- Indikator Tujuan per Urusan dalam Inmen Nomor 2 Tahun 2025 menjadi IKU Kepala OPD pada Renstra OPD;
- 45 Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD harus dikawal pada RPJMD atau Renstra OPD (sebagai IKU Renstra);
- Indikator Sasaran Renstra yang tidak menjadi bagian indicator tujuan urusan di Inmen, akan menjadi IKK OPD;
- Indikator Program OPD harus mempedomani Inmen Nomor 2 Tahun 2025 (juga akan menjadi IKK per Urusan);
- Pembahas memastikan agar strategi pada Renstra PD disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pada RPJMD;
- Pembahas memastikan agar Arah Kebijakan pada Renstra PD dirumuskan dari arah kebijakan pada RPJMD;
- Pembahas memastikan agar Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Perangkat Daerah beserta targetnya seluruhnya mengacu pada IKD Aspek yang relevan dengan Tusi OPD dan seluruh IKK per Urusan (Tabel 4.3 pada Bab 4 RPJMD);
- Pembahas memastikan keterisian target indikator pada Renstra PD dan Pagu Indikatif sampai level sub Kegiatan dari tahun 2025-2030 berpedoman pada tabel Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun ke depan pada Bab 4 RPJMD;
- Pembahas menyampaikan agar Perangkat Daerah dapat merinci komponen belanja kebutuhan pendanaan lima tahun ke depan;
- Pembahas mengarahkan agar OPD Menyusun Pohon Kinerja Perangkat Daerah dengan mempedomani Pohon Kinerja RPJMD;
- Pembahas mengarahkan OPD agar mengawal 12 Program Strategis pada Renstra PD (Misal Tanjung Carat di Renstra Dishub, Revitalisasi Pasar di Renstra Disdag, Masjid Sriwijaya di Renstra Perkim, Pariwisata OKUS dan Pagaralam di Renstra Disbudpar, KSPP di Renstra Dinas Pertanian TPH, Sultan Muda dan Koperasi Merah Putih di Renstra Diskop);
- Pembahas memastikan agar OPD telah memetakan seluruh sub kegiatan pada Tabel 4.2 Renstra Perangkat Daerah dengan 12 Program Strategis HDCU dan Proyek/Kegiatan Program Strategis Nasional (ProSN);
- Pembahas mengarahkan OPD agar Menyusun strategi dan arah kebijakan pada Renstra PD (Bahasa aksi) dengan merujuk pada strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Sumsel Tahun 2025-2029;

- Pembahas memastikan agar sub kegiatan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) telah dianggarkan pada Renstra Perangkat Daerah;
- Pembahas memastikan agar Perangkat Daerah telah menginput Renstra pada SIPD.

Hasil Pembahasan :

- Sistematika Penulisan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terutama Sub Bab untuk menyesuaikan dengan SE SEKDA Nomor : 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2029 (Jenis huruf Bookman Old Style Font 12 spasi 1,5 kertas F4)
- Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk menambahkan Dasar Hukum (Perpres No. 12 Tahun 2025 ttg RPJMN, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Perda Riset) untuk ditambahkan semua peraturan yang relevan dengan penulisan dokumen renstra BRIDA.
- Tujuan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah (sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)
- Permasalahan pada Renstra OPD agar dirumuskan secara ringkas berdasarkan data pada Sub Bab sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
- Bahasa indikator harus terukur dan jelas satuannya.
- DKPP untuk menambahkan Rincian Komponen Belanja Tahun 2025-2030 pada Renstra Tahun 2025-2029.

3. Penutup :

OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyesuaikan Renstra BRIDA Tahun 2025-2029 dengan SE SEKDA Nomor : 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 sebelum 29 September 2025.

Demikian Notulen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,



Ika Widiastuty, SP., M.Si
NIP.198410262010012001

DOKUMENTASI





RINCIAN KOMPONEN BELANJA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

PERANGKAT DAERAH : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BELANJA OPERASI	17.817.915.016	24.411.354.000	31.296.123.773	32.534.510.958	33.621.376.874	37.958.739.053	
1.	Belanja Pegawai :	12.841.378.000	18.122.854.000	19.935.139.400	21.922.278.340	24.108.506.172	26.522.356.791	
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.273.990.000	10.867.330.883	11.954.063.971	13.149.470.368	14.464.417.403	15.910.859.145	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	4.714.308.000	7.186.576.150	7.905.233.765	8.695.757.142	9.565.332.856	10.521.866.142	
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	562.194.000	767.264.341	843.990.775	928.389.853	1.021.228.838	1.123.351.722	
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	261.404.000	430.459.920	473.505.912	520.856.503	572.942.153	630.236.368	
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	500.522.000	746.233.560	820.856.916	902.942.607	993.236.868	1.092.560.555	
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	114.057.000	162.340.200	178.574.220	196.431.642	216.074.806	237.682.287	
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	295.366.000	410.443.935	451.488.328	496.637.161	546.300.877	600.930.965	
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.842.000	59.050.620	64.955.682	71.451.250	78.596.375	86.456.013	
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	87.000	61.847	68.032	74.835	82.319	90.551	
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	664.154.000	1.016.449.077	1.118.093.985	1.229.903.384	1.352.893.722	1.488.183.094	
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.496.000	14.857.723	16.343.495	17.977.844	19.775.628	21.753.191	
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31.460.000	44.569.590	49.026.549	53.929.204	59.322.124	65.254.336	
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.100.000	29.023.920	31.926.312	35.118.943	38.630.837	42.493.921	
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	5.567.388.000	7.255.523.117	7.981.075.429	8.772.807.972	9.644.088.769	10.611.497.646	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.517.388.000	7.118.023.117	7.829.825.429	8.612.807.972	9.474.088.769	10.421.497.646	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.517.388.000	7.118.023.117	7.829.825.429	8.612.807.972	9.474.088.769	10.421.497.646	
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.000.000	137.500.000	151.250.000	160.000.000	170.000.000	190.000.000	
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah							
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD							
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD							
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN							
	- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang /Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan/Jasa)	50.000.000	137.500.000	151.250.000	160.000.000	170.000.000	190.000.000	
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD							
	3) Belanja Pegawai BOS							
	4) Belanja Pegawai BLUD							
	5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD							
	6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH							
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.976.537.016	6.288.500.000	11.360.984.373	10.612.232.618	9.512.870.702	11.436.382.262	
3.	Belanja Bunga							
4.	Belanja Subsidi							
5.	Belanja Hibah							
	1) Hibah Kepada.....							
	2) Hibah Kepada.....							
	3) Hibah Kepada.....							
	4) Hibah Kepada.....							
	5) dst.....							
6.	Belanja Bantuan Sosial							
	1) Bantuan Sosial Kepada.....							
	2) Bantuan Sosial Kepada.....							
	3) Bantuan Sosial Kepada.....							
	4) Bantuan Sosial Kepada.....							
	5) dst.....							
II.	BELANJA MODAL	3.289.350.000	1.058.298.314	1.996.528.145	1.758.140.960	1.671.275.044	2.075.000.000	
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.500.000	858.298.314	1.776.528.145	1.518.140.960	1.426.275.044	1.775.000.000	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.218.850.000	200.000.000	220.000.000	240.000.000	245.000.000	300.000.000	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi							
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud							
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA							
IV.	BELANJA TRANSFER							
	1. Belanja Bagi Hasil							
	2. Belanja Bantuan Keuangan							
TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)		21.107.265.016	25.469.652.314	33.292.651.918	34.292.651.918	35.292.651.918	40.033.739.053	

Palembang, September 2025
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya / IV-d
197008041994021002